eJournal Ilmu Pemerintahan,11 (1): 2023 : 95-104
ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2022

STRATEGI KPU KOTA SAMARINDA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Imam Solikin, I Ketut Gunawan, Muh. Hairul Shaleh

eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 11, Nomor 1, 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul	:	Strategi KPU Kota Samarinda dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara
Pengarang	:	Imam Solikin
NIM	:	1502025047
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 8 Januari 2023

Pembimbing I	**Pembimbing II,**
Dr. Phil.I Ketut Gunawan M.A	**Dr. Muh. Hairul Saleh,S.Sos.,MA**
NIP. 19631212 1990002 1 001	**NIP. 19730308 200312 1 001**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	**:**	**eJournal Ilmu Pemerintahan**
Volume	**:**	**11**
Nomor	**:**	**1**
Tahun	**:**	**2023**
Halaman	**:**	**95-104**

eJournal Ilmu Pemerintahan, 11 (1) : 2023 : 95-104
ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2022

STRATEGI KPU KOTA SAMARINDA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020 DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Imam Solikin,[1] I Ketut Gunawan,[2] Muh. Hairul Saleh[3]

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk menganalis dan mendeskripsikan serta untuk mengidentifikasi Strategi KPU Kota Samarinda dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu Strategi KPU yang mendorong, hasil dari strategi, dan Strategi yang berperan (jika meningkat) atau penyebab mengapa menurun dalam mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda. Informannya ialah ketua PPK Samarinda Utara, PPS Lempake dan Masyarakat Lempake yang terlibat didalam pemungutan suara. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Temuan didalam penelitian ini adalah pengenalan atau sosialisasi bakal calon, sosialisasi Tatap Muka (face to face), pelaksanaan program, komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta penguatan dan komitmen. Selain itu juga hasil dari Strategi KPU dalam mendorong partisipasi politik dengan jumlah orang yang berpartisipasi meningkat namun persentasi yang memilih menurun dengan penyebab adanya wabah covid-19, tingkat apatisme masyarakat lebih memilih Golput dan kurangnya kepercayayaan masyarakat terhadap pemerintah

Kata Kunci : *Strategi, Partisipasi Politik, Pemungutan Suara*

---

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:imamsolikin752@gmail.com

[2] Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

[3] Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu pun menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi pada suatu Negara, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan (Dharmawan, 2016:1).

Sesuai dengan tugas dan peranan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang diatas. Rendahnya tingkat partisipasi pada Pemilihan Umum di suatu kota atau kabupaten, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi KPU Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dalam mencari strategi yang taktis untuk menjaring pemilih. Boleh jadi KPU sudah harus melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat dengan tidak hanya menggelar seminar saja, namun dibutuhkan suatu solusi yang tepat karena rendahnya sebuah partisipasi dari masyarakat, khususnya dari pemilih pemula.

Hal ini terjadi pada tahun selanjutnya, maka sebuah kesalahan besar dari Komisi Pemilihan Umum yang tidak mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat. KPU dalam mendorong partisipasi masyarakat melakukan pemetaan program peningkatan partisipasi melalui beberapa kegiatan dengan melakukan sosialisasi informasi pemilu. Tujuannya untuk penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemmapuan masyarakat tentang kepemiluan dan mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilitas sosial, media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya memudahkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan dengan baik.

KPU juga melakukan pendidikan politik bertujuan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik. Pendiidkan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan penjaringan sosial, media lokal, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan serta bentuk- bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai. Bentuk- bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pemilu antar lain dengan cara keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan keterlibatan dalam tahapan pemilu dan keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu.

KPU Kota Samarinda, menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 lalu, bisa mencapai 77,5 %. Untuk mencapai itu, sejumlah kegiatan sosialisasi dilakukan,

termasuk membentuk relawan demokrasi. Pada saat itu, tidak ditemukan masalah di KPU kota/kabupatenuntuk membentuk relawan demokrasi. Jika ada daerah yang tak bisa laksanakan itu, maka KPU Provinsi Kaltim yang akan turun tangan.

KPU Kota Samarinda melaksanakan peranannya dalam pemilu Legislatif mulai dari perencanaan segala kegiatan, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, memberikan informasi mengenai kampanye kepada masyarakat, membuat surat pemberitahuan atau selebaran, melakukansosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan penyusunan Daftar Pemilih, membagiakan kartu pemilih, menetapkan TPS-TPS, sampai pada akhirnya pelaksanaan pemungutan suara dan menetapkan hasil pemilihan umum.

Kecamatan Samarinda Utara merupakan urutan ke 3 jumlah pemilih terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dengan jumlah pemilih laki –laki sebanyak 19.293 orang danjumlah pemilih perumpuan 20.095 orang, jadi jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 39.389 orang dari 184 TPS. TPS terbanyak yang ada di Kecamatan Samarinda Utara yaitu kelurahan Lempake, sebanyak 44 TPS.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah pemilih kelurahan lempake berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 13.383 dengan laki-laki berjumlah 6.867 orang dan perempuan berjumlah 6.516 orang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dan dilakukan wawancara dengan petugas KPU Kota Samarinda yang memberikan informasi diperoleh informasi bahwa, ada beberapa gejala dalam pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yaitu: masih rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake, sikap apatis warga itusendiri terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktifitas harian seperti bekerja, kegiatan komunitas sosial, berolahraga, bertamasya dan lain sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata untuk individu masing-masing warga masyarakat dibandingkan denganpartisipasi dalam politik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Strategi KPU Kota Samarinda dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara?
2. Bagaimanakah Hasil dari Strategi KPU Kota Samarinda dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.? Jika meningkat Strategi apa yang paling berperan? Jika menurun, mengapa?

Teori dan Konsep

Strategi

Menurut Chandler (dalam Salusu, 2015:64), strategi merupakan Sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya Menurut Rosady Ruslan (dalam Haryono,

2018:68), mengemukakan bahwa strategi pada hakekatnya merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya.

Kemudian menurut Husein Umar (dalam Haryono, 2018:68) mengatakan bahwa Strategi yang baik adalah strategi yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat dengan tujuan perusahaan dan dapat menjadi dorongan semangat secara terus-menerus bagi anggotanya. Dan menurut Menurut Tangkilisan (dalam Haryono, 2018:68) mengatakan adalah Strategi juga dikenal dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang biasanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang dicapai suatu program pembangunan, sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada, dengan cara mengoptimalkan dan mengalokasikan secara tepat sumberdaya tersebut.

Kemudian Jadi dapat dipahami bahwa strategi adalah suatu cara atau langkah-langkah yang terencana dengan mengintegrasikan segala sumber daya dan kemampuan dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, cara atau langkah Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pegangan atau pedoman untuk berupaya dan berbuat untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih pada pemilu, dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih.

Tingkat-tingkat Strategi

Menurut pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam Salusu, 2015:68) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy, corforate strategy, business strategy*, dan *functional strategy*.Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan Hunger (dalam Salusu, 2015:68) mengenal tiga tingkatan strategi, yaitu:

1. *Enterprise strategy*

   Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntunan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.
2. *Coporate strategy*

   Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.
3. *Business strategy*

   Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, para pengusaha, para anggota legislatif, para donor, para politisi dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

Tipe-tipe Strategi

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, Koteen (dalam Salusu 2015:69) sesungguhnya tidak berbeda pandangan dengan Higgins, Wheelen dan Hunger, meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklasifikasikan strategi itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Corporate strategy* (strategi organisasi)
2. *Program strategy* (strategi program)
3. *Resource support* strategy (strategi pendukung sumber daya)
4. *Institusional strategy* (strategi kelembagaan)

Jadi, strategi merupakan suatu kerangla rencanda dan Tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi factor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki tak-tik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Atau Kota. Ayat 7 pasal ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota (ayat 8).

Komisi Pemilihan Umum menurut Hakim (2010:55) merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK.

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antaralain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan anggota Komisi Pemilihan Umum diharuskan non-partisipan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda merupakan *auxiliary state body*, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (main state organ), secara hierarki termasuk dalam kategori *auxiliary state* organ yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi

pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia.

Pilkada

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerpan peraturanpemerintah pengganti telah resmi membekukan bahwa recreutment Kepala Daerah dilakukan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak.

Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat, pemilihan kepala daerah dilakukan bersamaan dengan wakil kepala daerah. Dimana kepala daerah diantaranya Gubernur untuk Provinsi, Bupati, untuk Kabupaten dan Walikota untuk Kota. (Rahmat Hollyson Mz, 2015:20).

Partisipasi Politik

Persoalan itu tidak banyak diungkap, bahkan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.

Makin tinggi tingkat pasrtisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Menurut Mistar (2015:42), pengertian pastisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalamkehidupan politik, dan mereka memberikan hak suara secara langsung, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan memilih perwakilan rakyat secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan atau aktivitas seperti memberikan suara dalam pemilihan umum baik pemilihan legislatif maupun eksekutif, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, dan sebagainya.

Selanjutnya Menurut Verhangen (dalam Mardikanto, 2018:16) mengatakan Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu". Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri".

Kemudian menurut Isbandi (dalam Firmansyah, 2014:26), dimana Partisipasi dapat juga berarti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Maka dapat dipahami bahwa atas dapat disimpulkan bahwa, partisipasi politik adalahsegala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yangtidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi dalam aktivitas-aktivitas politiknya.

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politk adalah cata atau langkah-langkah secara keseluruhan yang berkaitan dengan untuk menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang luber, jurdil, jauh dari intervensi kekuasaan yang terencana dengan mengintegrasikan segala sumber daya dan kemampuan dalam meningkatkan segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan pemilih dalam pemungutan suara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah:

1. Strategi KPU Kota Samarinda untuk mendorong partisipasi politik dalam pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.
2. Hasil dari strategi KPU Kota Samarinda untuk mendorong partisipasi politik dalam pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamata Samarinda.
3. Strategi yang paling berperan (jika meningkat) atau penyebab mengapa menurun dalam mendorong partisipasi politik dalam pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: Data primer dan data sekunder. *Key informan* sebagai sumber data primer adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda..Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip dan laporan mengenai strategi KPU Kota Samarinda dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) tinjauan pustaka (*library research*), (2) Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi kegiatan: (1) Kondensasi Data (*Data Condesation*), (2) Penyajian Data (*Data Display*), (3) Penyimpulan/Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi KPU Kota Samarinda dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda

Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara

a. ***Strategi KPU Kota Samarinda dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara***

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan sosialisasi bakal calon, sosialisasi tatap muka, pelaksanaan program, komunikasi yang baik dengan masyarakat dan penguatan dan komitmen. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan penguatan komitmen yang dilakukan adalah hal yang menjadi permasalahan di masyarakat kurangnya berpartisipasi dalam pemilu juga karena kurangnya kepercayaan masyarakat. Tingkat apatisme masyarakat ketika berbicara soal politik timbul apatisme yang tinggi di masyarakat

b. ***Hasil Strategi KPU Kota Samarinda dan hasilnya yang paling berperan dalam Mendorong Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa data KPU Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 jumlah pemilih sebanyak 12.495 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 7.514 jiwa dengan persentase 57% pemilih yang turut hadir. Sedangkan di tahun 2020 jumlah pemilih sebanyak 13.741 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.736 dengan persentase 53%. Dengan demikian maka persentase partisipasi pemilih menurun. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu adanya wahah covid-19, tingkat apatisme masyarakat lebih memilih Golput untuk bekerja dibanding datang ke tempat pemungutan suara, kurangnyn kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam Strategi KPU Kota Samarinda dalam mendorong partisipasi politik dalam pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi KPU Kota Samarinda dalam mendorong partisipasi politik dalam pemungutan suara ada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara adalah a). pengenalan atau sosialisasi bakal calon, b). sosisalisasi tatap muka (face to face), c). pelaksanaan program, e). penguatan dan komitmen.
2. Hasil dari Strategi KPU dalam mendorong partisipasi politik adalah dengan jumlah orang yang berpartisipasi meningkatkan (7.514-7.736) namun persentase menurun (57%-53%). Adapun penyebab preaentase menurun adalah wabah covid-19, dan

Tingkat apatisme masyarakat lebih memilih Goput untuk bekerja dibanding datang ke tempat pemungutan suara, kurangnya kepercayaaan masyarakat terhadap pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait strategi KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, supaya kiranya tidak menjadikan uang sebagai faktor partisipasi dalam pilkada atau faktor untuk menentukan siapa yangakan dipilih dalam ajang Pilkada.
2. Terhadap peserta Pilkada, baik pasangan calon maupun partai politik supaya terus menerus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi aturan-aturan pemilihan umum.
3. Untuk lebih meningkatkan partisipsi pemilih dalam Pilkada yang akan datang masyarakat yang memiliki KTP namun tidak mendapat undangan karena persoalan domisili hendaknya waktu lebih panjang untuk bisa memilih di TPS terdekat tempat domisilinya.
4. Untuk internal KPU Kota Samarinda agar terus menerus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan
5. Terhadap pemerintah, supaya kiranya mempersiapkan pembuatan peraturan-peraturan pemilihan dengan lebih matang sehingga kedepan peraturan perundang-undangan pemilihan kita lebih baik dari sebelum- sebelumnya.

Daftar Pustaka

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT RINEKA CIPTA.

Amstron dan Baron. 1998. Menejemen Kinerja - Realitas Baru. Institute of Personalia dan Pembangunan. London.

Anwar Khairul dan Muhammad Ras Muis. 2003. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*. Jakarta: Unri Pers

Dwiyanto, Agus, dkk. (2003). Konflik di Era Otonomi Daerah dalam “Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah”, PSKK-UGM, Yogyakarta.

Hikmat Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press

Kartasasmitha Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT. Pusaka Cisendo.

Kartono. 2002. *Kartini pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta : Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LP3ES.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, CV.

Uno, Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif*